

Implikasi hukum terhadap akta pembagian harta bersama yang ditandatangani di luar wilayah jabatan dihadapan PPAT lain (analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 570/K/PID/2017) = The implication toward deed of division of co-property who sign by other land deed official in another district of authority (analysis of supreme court decision Number 570/K/PID/2017)

Anggarini Pawestri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20492651&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Menerima limpahan pekerjaan dari sesama rekan PPAT yang berbeda wilayah kerja berdasarkan rasa percaya, yang selama ini dalam perakteknya memang sering dilakukan oleh para PPAT. Namun rasa percaya terhadap rekan sesama PPAT tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan akta dengan mengesampingkan prosedur-prosedur dalam pembuatan akta. Ada dua masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu: tanggung jawab PPAT yang melakukan pembuatan akta APHB di luar wilayah jabatannya; dan akibat hukum pembuatan akta APHB yang ditanda tangani diluar wilayah jabatannya dihadapan PPAT lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berhubungan mengenai masalah hukum seperti peraturan-peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Menurut sifatnya penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif-analitis serta menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa terhadap akta APHB yang dibuat oleh PPAT diluar wilayah jabatannya yang ditanda tangani di hadapan PPAT lain tanpa dihadiri para pihak, saksi ataupun di bacakan oleh PPAT membuat tidak terpenuhinya prosedur dan tata cara pembuatan akta, sehingga mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dan terhadap kepemilikannya kembali menjadi harta bersama dan perbuatannya dianggap tidak pernah dilakukan. Terhadap perbuatan PPAT tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya baik secara administratif, perdata maupun pidana.

<hr />Receiving the work allocation from a fellow notary public/Land Deed Official having a different authority region based on trust in practice has so far been quite ubiquitous among Land Deed Officials. Nevertheless, the trust among the fellow notary publics/Land Deed Officials are not supposed to be the basis in making deeds not taking into accounts the procedures in making deeds. Two problems were raised in this thesis, namely: Land Deed Officials responsibilities making Deeds of Shared Assets outside their authority region; and legal consequences of the making of Deeds of Shared Assets signed outside their authority region before another Land Deed Official. The method used in this research was juridical-normative, which is a research which uses a way to obtain data from literature material mainly related to legal problems such as written regulations or positive law and other law materials related to the problem of this research. The type of this research was descriptive-analytical research type using secondary data, which were primary law materials and secondary law materials. The result of this research concluded that Deeds of Shared Assets made by a Land Deed Official outside the authority region signed before and attested by another Land Deed Official without the presence of witnesses or without being read by the Land Deed Official did not fulfil the

procedure of making deeds, resulting in the deeds being regarded as null and void, and the ownership would be regarded as shared assets and the legal action would be regarded as having never happened. The respective Land Deed Official could be held responsible, be it administratively, based on civil law or criminal law.